

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.

Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.

Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006.

Martha Eri Safira, *HUKUM TATA NEGARA Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

M masan dan Rachmat, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6, (Jakarta:PT. Grasindo, 2011).

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013.
- Nura Basukia Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dana Tindak Pidana Korupsi*, Laksbanga Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Nurudin Hadi, “*Wewenang Mahkamah Konstitusi-Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*”, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Rahmat Bagja, Dayanto *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Konsep Prosedur dan Teknis Pelaksanaan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sunarto, “*Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45. No. 2, 2016.
- Sutoro Eko, *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan desa*, Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD), Jakarta, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, Widyaaiswara Pusdiklst PSDM, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Huikum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Jurnal

Alif Afdillah, *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur dan Adil*

di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, 2019.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.

Cora Elly Novianti, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10,
No. 2, 2013.

Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 22, No. 3: Juli 2015.

Hazamuddin, *Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran*

Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan, vol, 6 No. 1, 2023.

Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu* : *Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta , 2018.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kristianti, J, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*. Bandung. CSIS.

Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Vol. 2 No. 1, Juni 2018.

Muhammad Sabaruddin Sinapoy, *Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, vol. 4, Agustus 2022.

Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan , Marzuki, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor

7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)". Vol. 2 No. 2,

Juni 2021.

Pulung Abiyasa, *Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, 2019.

Ririn Handayani, *Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2015.

Rumi, Jalaluddin, ***Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum***, 2021.

Yessinia Bela Abidin, La Sensus, & Guasman Tatawu, “*Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu*”, Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 2, August 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

D. Internet

Zona Referensi.com, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, 2020, (akses 24 Maret 2022).

Didik Supriono, “*Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1 Tahun 2019, hal. 10 dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf diakses tanggal 2 Oktober 2017 <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 25 Juni 2022 pukul 02

